

BAB VIII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan menggunakan pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam bab pendahuluan sebagai penuntun, penulis dapat menarik kesimpulan studi ini sebagai berikut: Analisis diatas menunjukkan bahwa pola interaksi aktor dalam perebutan kendali atas formulasi kebijakan perkebunan adalah pola interaksi yang didominasi oleh tokoh lokal yang efektif menanamkan pengaruh politik dalam membuat keputusan perkebunan kelapa sawit. Para aktor yang memegang kendali atas kebijakan perkebunan inilah yang memberi arah dalam mempengaruhi proses sinergisitas formulasi kebijakan perkebunan di Riau sejak 2005- hingga 2010. Abstraksi dari fenomena sosial inilah yang menjadi basis model sinergisitas formulasi kebijakan era desentralisasi di Riau. Model yang mengetengahkan variabel keterlibatan Aktor (masyarakat, pemerintah dan swasta), kepentingan, basis osial dan sumber daya mulai dari tingkat isu kebijakan, masalah dan formulasi dan legitimasi kebijakan. Uraian yang lebih spesifik lagi atas pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para birokrat di Daerah bersaing dengan tokoh partai politik dan swasta memperebutkan kendali formulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit. Formulasi kebijakan publik adalah hasil dari pergulatan politik. Sebab pergulatan politik akan menghasilkan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan publik mengenai kelapa sawit di Riau adalah sebagai hasil dari pergulatan politik lokal maupun nasional. Aktor-aktor dengan

kepentingan yang berbeda-beda berinteraksi dalam mewarnai proses kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau. Kelompok-kelompok yang merespon kebijakan perkebunan itu dapat dikelompokkan yang pro, menolak, dan menerima dengan syarat kebijakan. Sinergisitas kebijakan desentralisasi sangat ditentukan oleh kemampuan merangkul kelompok-kelompok itu.

2. Cara aktor mencapai kepentingan terkait formulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit memanfaatkan arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta menggunakan jaringan di tingkat lokal maupun nasional. Sejak penyusunan kebijakan perkebunan kelapa sawi K2-I, kebijakan ini mendapat dukungan sekaligus penolakan. Seperti yang sudah diuraikan di bab VI dukungan datang dari misalnya Birokrasi Pusat dan Daerah dan Perusahaan. Dukungan Perusahaan perkebunan negara diberikan melalui jaringan PERKAPEN. Para pemain yang mendukung kebijakan perkebunan pada masa itu mempunyai kepentingan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pesat melalui surplus komoditi kelapa sawit. Kelompok ini memiliki jaringan dari tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi hingga Desa. Kelompok ini tidak hanya berdomisili di Pekanbaru, melainkan ada juga yang berada di Jakarta..

3. Preferensi para aktor dalam memilih kebijakan perkebunan K2-I sebenarnya mempertimbangan keuntungan kelompok masyarakat lokal jangka pendek. Nalar ekonomi-politik studi ini terletak pada ketika para pemain lokal dan nasional berdebat memilih pola K2-I yang akan diterapkan di Riau. Sebelum 1999, perdebatan aktor memang tidak terjadi di tingkat lokal. Karena Pusat lebih dominan, aktor lokal hanya perpanjangan tangan Jakarta. Sesudah 1999, tumbuh

keleluasaan aktor dalam menentukan pilihan-pilihan kebijakan. Bagaimana pergulatan politik lokal mengenai isu kebijakan perkebunan kelapa sawit berlangsung sehingga pada akhirnya kelompok pendukung pola kemitraan dapat memenangkan persaingan dalam proses kebijakan perkebunan kelapa sawit K2-I.

4. Dalam perpolitikan lokal yang pluralistik, formulasi kebijakan seolah-olah disusun para elit lokal secara sendiri-sendiri. Pada hal, hasil akhir proses kebijakan perkebunan kelapa sawit ditentukan oleh keberhasilan membangun koalisi dan negosiasi dengan kelompok-kelompok informal lainnya. Inilah yang menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi perkebunan kelapa sawit K2-I itu penuh konflik dan mengapa kelompok birokrasi pemerintahan dapat memenangkan persaingan untuk tetap menerapkan kebijakan perkebunan kelapa sawit K2-I di Riau

Pada masa OTDA, pengorganisasian para aktor dalam perpolitikan lokal secara politik agak melemah, walaupun pada batas-batas tertentu jumlah organisasi yang mewarnai isu kebijakan perkebunan bertambah. Hal ini terjadi karena para aktor mengalami banyak kesulitan dalam bekerjasama, batas antara kepentingan individual dan organisasi sangat tipis. Para aktor seolah-olah bergerak sendiri-sendiri, tetapi pada waktu bersamaan para pemain ini mengukung institusi dalam merebut peluang-peluang ekonomi-politik perkebunan. Sehingga inisiatif lokal yang muncul lebih banyak dalam kepentingan individual. Keterbatasan dalam bekerjasama inilah yang menjadi penjelasan mengapa konflik pengorganisasian aktor mewarnai perpolitikan lokal di Riau kasus kebijakan perkebunan kelapa sawit K2-I terjadi.

2. Rekomendasi

Paling tidak ada empat hal yang menarik dari hasil studi ini yang dapat dijadikan rekomendasi. *Pertama*, agar formulasi kebijakan tidak berlangsung dalam situasi konflik terus menerus. Proses ini hendaknya menghindari kebijakan perkebunan yang eksploitatif di daerah. Hal ini terjadi karena adanya desakan ekonomi sebagai akibat merosotnya devisa negara pada masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi dewasa ini telah memaksa negara menggali sumber-sumber devisa baru. Strategi ini memberi implikasi pada sifat hubungan politik yang simbiosis antara aktor pusat, Birokrat, Pemilik perkebunan besar, dan para elit lokal sedemikian rupa dalam memproduksi kebijakan-kebijakan ekonomi-politik lokal. Tetapi para aktor itu gagal dalam membangun hubungan partisipasi berdasarkan akuntabilitas politik. Pada hal, diterapkannya desentralisasi muncul persaingan antar kelompok; birokrasi Pemda, pengusaha perkebunan (besar), dan politisi partai memakai berbagai arena memanfaatkan isu perkebunan sebagai isu politik lokal. Dalam perjalanannya, intensitas pergulatan politik itu semakin dinamik dengan tampilnya LSM, para kelompok adat, pemimpin partai, kelompok kepentingan berbasis etnik. Kelompok-kelompok inilah yang mewarnai formulasi kebijakan sawit K2-I.

Kedua, dalam menghadapi problematika kebijakan perkebunan tambal sulam (komplementer) dalam konteks OTDA. Perlu membangun koalisi, negosiasi dengan kelompok-kelompok informal lainnya sejak merumuskan isu kebijakan.. Karena kebijakan K2-I dibuat dalam situasi masing kelompok yang bersaing memperjuangkan kepentingan yang berbenturan, dengan basis dukungan

yang beragam, dan perbedaan sumber daya politik yang dimiliki. Pengalaman ini menginspirasi studi ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut: Sinergisitas formulasi kebijakan mengenai kelapa sawit K2-I di Riau ditentukan oleh pergulatan antar kelompok birokrat, pengusaha, politisi yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya yang berbenturan dan kemenangan dalam persaingan itu ditentukan oleh keberhasilannya berinteraksi membangun koalisi dan negosiasi mulai dari tingkat isu kebijakan, masalah, dan formulasi dan legitimasi kebijakan.

